

## ABSTRAK

Transparency International Indonesia (TII) telah merilis indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2020 yang mengalami penurunan signifikan. IPK Indonesia 2020 turun menjadi 37 dari skor 40 pada 2019. Secara peringkat, posisi Indonesia juga melorot dari peringkat 85 menjadi peringkat 102 dari 180 negara yang diukur IPK-nya. Turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus dipandang serius dan menjadi koreksi bagi kebijakan pemberantasan korupsi di tanah air. Indonesia saat ini belum tegas dalam memberantas kegiatan tindak pidana korupsi, hal ini dapat dilihat dari KPK yang memiliki permasalahan dalam menerapkan UU TPPU dalam kasus korupsi, Misalnya pada kasus Panitera Pengadilan Jakarta Utara, di mana KPK memisahkan antara perkara korupsi dengan TPPU. Padahal UU TPPU juga dapat memaksimalkan pengembalian kekayaan negara dari kasus-kasus korupsi yang sudah diputuskan pengadilan. Tindak Pidana Pencucian Uang didalam KUHP maupun RKUHP tidak diatur secara khusus dalam suatu bab tersendiri. Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia semakin beragam jenis sehingga upaya pemerintah di Indonesia untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana sering kali dinilai kurang efektif. Oleh karna itu penting untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset ini agar dapat memaksimalkan ketentuan upaya perampasan aset tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan penyitaan aset dan masih terdapat kelemahan regulasi dalam pengaturan Penyitaan Aset maka dari itu betapa pentingnya pembaruan hukum yang membahas Penyitaan aset sehingga diharapkan proses penyitaan aset serta perampasan aset tindak pidana pencucian uang di Indonesia akan berjalan efektif.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, RUU Perampasan Aset, KUHP**

## ABSTRACT

Transparency International Indonesia (TII) has released the Indonesia's corruption perception index (IPK) in 2020, which experienced a significant decline. Indonesia's 2020 GPA dropped to 37 from a score of 40 in 2019. Rank-wise, Indonesia's position has also dropped from 85 to 102 out of 180 countries measured by its GPA. The decline in the score of Indonesia's Corruption Perceptions Index must be taken seriously and become a correction for policies to eradicate corruption in the country. Indonesia is currently not firm in eradicating criminal acts of corruption, this can be seen from the KPK which has problems in applying the Money Laundering Law in corruption cases, for example in the case of the Registrar of the North Jakarta Court, where the KPK separates corruption cases from money laundering offenses. Whereas the Money Laundering Law can also maximize the return of state assets from corruption cases that have been decided by the court. The crime of money laundering in the Criminal Code and the RKUHP is not specifically regulated in a separate chapter. The crime of money laundering in Indonesia is increasingly diverse, so that the efforts of the government in Indonesia to confiscate assets resulting from criminal acts are often considered ineffective. Therefore, it is important to ratify this Asset Confiscation Bill in order to maximize the provisions on efforts to confiscate assets for the crime of money laundering. This research uses normative juridical legal research methods, namely legal research methods carried out by researching library materials or secondary materials. The problem approach used in this study uses a statute approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that there are still inhibiting factors in the implementation of asset confiscation and there are still regulatory weaknesses in the regulation of Asset Confiscation, therefore how important it is to reform the law regarding asset confiscation so that it is hoped that the process of confiscation of assets and confiscation of assets for the crime of money laundering in Indonesia will run effectively.

**Keywords : Criminal Act, Confiscation of Assets, Criminal Law**